
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM (PKE) DI KABUPATEN SUMEDANG

Agussyahrul Noer Erlanda
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jul 12, 2025
Revised Nov 15, 2025
Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

*Collaborative Governance
Extreme Poverty
Cross Sector Collaboration*

ABSTRACT

The eradication of extreme poverty is a national development priority that requires cross-sectoral and collaborative approaches. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in addressing extreme poverty in Sumedang Regency, using the theoretical model proposed by Ansell and Gash (2007), which includes four key dimensions: starting conditions, facilitative leadership, institutional design, and the collaborative process. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that collaboration has been implemented through cross-sectoral forums and regional programs such as "One Government Agency, One Assisted Village." However, several obstacles remain, including cultural, institutional, and political factors such as lack of trust among actors, underdeveloped technical regulations, and limited involvement of non-governmental sectors. Efforts to overcome these challenges include building trust, drafting collaborative standard operating procedures (SOPs), cross-sectoral training, and inclusive political leadership. The study concludes that Collaborative Governance in Sumedang Regency has shown significant progress but still requires strengthened regulatory frameworks and broader multi-sector participation to ensure greater effectiveness and sustainability.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Agussyahrul Noer Erlanda
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang.
Email: agusrenyoh69@gmail.com

1. INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan isu utama dari 17 Tujuan Pembangunan Global (TPG) sekaligus menjadi komitmen bersama dari 193 Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk di dalamnya adalah swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Perjanjian global ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan tantangan bangsa bangsa di seluruh dunia yang semestinya ditangani bersama secara komprehensif, integratif, dan inklusif. Kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi dimana mencakup banyak aspek. Kemiskinan ekstrem adalah keadaan dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Bank Dunia mendefinisikan penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) dianggap miskin ekstrem. PPP dihitung dengan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (Badan Pusat Statistik, 2024)

Penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan collaborative governance menjadi sangat penting karena kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi, tetapi juga sosial dan struktural yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks ini, pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan solusi yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan adanya kolaborasi multisektor, sumber daya dapat dioptimalkan, kebijakan dapat diselaraskan, dan program dapat lebih tepat sasaran. Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dijelaskan bahwa Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran dalam arah kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menggarisbawahi pentingnya mendorong pelibatan sektor non-pemerintah, seperti swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas, yang diwujudkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menganalisis upaya-upaya *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang sehingga dapat menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain. Dengan menyoroti peran pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, penelitian ini mengkaji efektivitas kerja sama lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan ekstrem serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 menjelaskan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu dari 212 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Kabupaten Sumedang untuk tahun 2023 ini adalah 9,36 persen atau turun sebesar 0,78 poin dari 10,14 pada tahun 2022. Metode penghitungan kemiskinan BPS adalah pendekatan "*basic needs approach*" dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidupnya baik makanan dan bukan makanan. Dari persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, dicatat juga kemiskinan ekstrem atau masyarakat yang paling rendah tingkatan kesmiskinannya. Perbedaan dua tingkatan klasifikasi itu BPS menggunakan garis kesmiskinan yang di dapat dari hasil Survey Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap bulan Maret setiap tahunnya. Garis Kemiskinan untuk Tahun 2023 di Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 396.573,- per kapita/bulan, sedangkan Garis Kemiskinan Ekstrem adalah Rp. 260.569,- per kapita/bulan. Hasil Susenas BPS kemiskinan ekstrem Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 6.370 orang (0,53 persen) jauh berkurang dari tahun 2022 yang mencapai 36.820 orang (3,11 persen).

Tabel 1. Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Sumedang, 2021-2023

| Angka Kemiskinan | Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Sumedang | | |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | 111,40 | 120,10 | 126,30 |
| Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan) | 396.573,00 | 371.870,00 | 360.054,00 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 1,64 | 1,98 | |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,35 | 0,53 | |

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Kabupaten Sumedang untuk tahun 2023 ini adalah 9,36 persen atau turun sebesar 0,78 poin dari 10,14 pada tahun 2022. Metode penghitungan kemiskinan BPS adalah pendekatan “*basic needs approach*” dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidupnya baik makanan dan bukan makanan. Dari persentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tersebut, dicatat juga kemiskinan ekstrem atau masyarakat yang paling rendah tingkatan kesiskinannya. Perbedaan dua tingkatan klasifikasi itu BPS menggunakan garis kesiskinannya yang di dapat dari hasil Survey Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap bulan Maret setiap tahunnya. Garis Kemiskinan untuk Tahun 2023 di Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 396.573,- per kapita/bulan, sedangkan Garis Kemiskinan Ekstrem adalah Rp. 260.569,- per kapita/bulan. Hasil Susenas BPS kemiskinan ekstrem Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 6.370 orang (0,53 persen) jauh berkurang dari tahun 2022 yang mencapai 36.820 orang (3,11 persen).



Gambar 1. Statistik Kemiskinan di Kabupaten Sumedang tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan gambar yang ditampilkan, terlihat adanya tren perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023. Pada grafik sebelah kiri, tingkat kemiskinan di Sumedang menunjukkan penurunan yang konsisten dari 10,14% pada tahun 2022 menjadi 9,36% pada tahun 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Jawa Barat yang mencapai 9,62% dan Indonesia secara keseluruhan yang berada di angka 9,62% pada tahun yang sama. Tren ini mencerminkan keberhasilan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang, terutama melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.

Sementara itu, grafik di sebelah kanan menunjukkan jumlah penduduk dan persentase kemiskinan ekstrem di Sumedang dari tahun 2021 hingga 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan signifikan dari 31,71 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 6,37 ribu orang pada tahun 2022, dan turun lebih drastis lagi menjadi 0,53 ribu orang pada tahun 2023. Persentase kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan dari 2,69% pada tahun 2021 menjadi 0,53% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan, termasuk program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Binaan yang fokus pada pendampingan desa prioritas serta pemanfaatan dana CSR dari perusahaan swasta.

Data ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di Sumedang memberikan hasil yang signifikan. Namun, penurunan ini juga membuka ruang untuk analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut, serta tantangan yang masih dihadapi dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas program-program yang diterapkan, kolaborasi antar instansi, serta peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang.

Namun, kolaborasi dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Hambatan seperti rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor, belum adanya regulasi yang kuat, dan perbedaan kepentingan sering kali menjadi penghalang efektivitas kolaborasi. Dalam konteks ini, collaborative governance dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk mendorong sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi collaborative governance di Kabupaten Sumedang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

2. METHOD

Dalam penelitian, landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Landasan teori juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang penelitian dan dijadikan bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian tersebut diambil dari teori menuju data dan berakhir padapenerimaan atau penolakan terhadap suatu teori. Adapun penelitian kualitatif, peneliti mengacu pada teori yang ada sebagai bahan penjelasan, kebalikan dari kuantitatif, pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau metode naturalistik, penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah. Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017: 96) Purposive sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Artinya yang digunakan sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada hubungannya dengan collaborative governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sumedang. Dari data pegawai di Kabupaten Sumedang yang dijadikan informan atau sasaran hanya 6 (enam) orang meliputi Pemerintah Kab Sumedang, Akademisi dan Non pemerintahan yaitu:

Tabel 3. Subjek Penelitian

| NO | UNSUR | JUMLAH (ORANG) |
|---------------|---|----------------|
| 1 | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Sumedang | 1 |
| 2 | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sumedang | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang | 1 |
| 4 | Pimpinan (BAZNAS) Kabupaten Sumedang | 1 |
| 5 | Akademisi/Peneliti dari Universitas Sebelas April | 1 |
| 6 | Divisi Humas Bank BJB Cabang Sumedang | 1 |
| JUMLAH | | 6 |

Berdasarkan tabel diatas, pegawai yang dijadikan informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti, bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggungjawab terhadap *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sumedang. Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknologi pengumpulan data menurut Sugiyono (2017: 224-241) sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan yang berlaku, laporan-laporan, arsip serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang kelancaran pencarian data.
- b. Studi lapangan, yaitu suatu Teknik mengumpulkan data yang diperoleh langsung dilangan dengan cara :
 - 1) Observasi, yaitu melakukan pengantaran secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala hal kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - 2) Wawancara mendalam, yaitu mengumpulkan data dengan cara meminta penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta searah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto, dan catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.

Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda- beda dengan teknik yang sama.

3. RESULTS AND DISCUSSION (10 pt)

Dalam melakukan *collaborative* perlu memperhatikan beberapa dimensi menurut (Ansell & Gash, 2007) yaitu sebagai berikut.

1. Kondisi Awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Kelembagaan
4. Proses Kolaboratif

Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sumedang, secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik, hasil tersebut dapat dilihat dari dimensi Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif, Desain Kelembagaan, dan Proses Kolaboratif.

1. Dimensi Kondisi Awal, Seluruh pihak seperti perangkat daerah, BAZNAS, Bank BJB, akademisi, dan swasta menunjukkan peran aktif dalam kolaborasi sesuai kapasitas masing-masing, dengan mengoptimalkan sumber daya tanpa anggaran tambahan. Situasi ini mencerminkan apa yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:560), bahwa kondisi awal merupakan elemen penting dalam memengaruhi jalannya kolaborasi, termasuk dalam hal distribusi sumber daya, sejarah kerja sama, dan tingkat kepercayaan antarpihak. Kolaborasi yang berlangsung secara harmonis dan minim konflik juga memperlihatkan adanya *prehistory of cooperation* yang kuat, diperkuat oleh keberadaan TKPKD sebagai forum lintas sektor. Kejelasan peran dan mekanisme musyawarah menjadi penopang utama dalam menghindari konflik dan menjaga stabilitas kolaborasi sejak awal.
2. Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif, Pemimpin dari berbagai lembaga memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka, sebagaimana ditegaskan Ansell dan Gash (2007:561) bahwa pemimpin fasilitatif harus mampu memediasi, mengintegrasikan, serta menjaga agar semua aktor merasa terlibat secara setara. Pemanfaatan aplikasi RAHARJA sebagai instrumen digital mencerminkan bentuk inovasi kepemimpinan dalam menyediakan sarana komunikasi dan pelaporan real-time. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson et al. (2012), bahwa teknologi dapat menjadi bagian dari kapasitas kepemimpinan dalam mendukung *collaborative dynamics* secara efisien, akuntabel, dan responsif.
3. Desain Kelembagaan, Kolaborasi di Sumedang berjalan di atas fondasi kelembagaan yang kuat dan formal, dengan adanya regulasi seperti Inpres, SK Bupati, MoU, dan Perda. Ini sejalan dengan kerangka *institutional design* menurut Ansell dan Gash (2007:564), yang menyebut bahwa aturan dasar kolaborasi harus inklusif, transparan, serta disepakati oleh semua pihak agar menjadi legitimasi yang kuat. Walaupun masih ada aturan semi-formal, praktik kolaboratif tetap terstruktur karena didukung pengawasan serta koordinasi yang jelas. Pendekatan kelembagaan ini juga mendukung prinsip *accountable governance* dan *forum exclusiveness*, di mana semua pihak tahu kapan dan bagaimana mereka harus terlibat, serta memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan.
4. Proses Kolaboratif, Proses kolaboratif yang berlangsung secara aktif melalui dialog tatap muka dan daring seperti FGD dan Zoom mencerminkan prinsip *face-to-face dialogue* dan *trust building* yang menjadi inti dari model Ansell dan Gash (2007:532). Proses ini mendorong terciptanya *shared understanding*, yang diperkuat dengan keterlibatan semua pihak dalam evaluasi dan pelaporan berbasis data, dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Komitmen kolektif yang konsisten dan kegiatan edukatif dari akademisi serta BAZNAS juga memperkuat dimensi *mutual learning* dalam kolaborasi, sebagaimana ditekankan oleh Bryson et al. (2015) bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada kesediaan para aktor untuk belajar dan beradaptasi secara bersama-sama dalam menjalankan tujuan bersama.
5. Faktor Budaya, Faktor budaya dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Kabupaten Sumedang memperlihatkan dua indikator penting, yaitu kepercayaan antar aktor dan keselarasan nilai-norma lokal. Kepercayaan dibangun melalui mekanisme formal seperti pertemuan rutin dan sistem evaluasi berbasis data, serta mekanisme informal seperti komunikasi intensif dan keterbukaan antar lembaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2007:547) yang menekankan bahwa kepercayaan adalah elemen fundamental dalam *collaborative governance*, karena tanpa kepercayaan antar aktor, dialog yang bermakna dan pengambilan keputusan berbasis konsensus tidak akan tercapai. Keselarasan nilai dan norma juga menjadi kekuatan dalam menciptakan kolaborasi yang berakar pada kearifan lokal, tercermin dari adanya SOP dan pedoman kolaboratif yang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat.
6. Faktor Institusi, Kerangka regulasi dan kapabilitas kelembagaan telah diperkuat secara konsisten. Keberadaan Peraturan Bupati, SOP teknis, dan SK pembentukan tim teknis telah memberikan legitimasi dan arah bagi kerja kolaboratif lintas sektor. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012:5), regulasi yang jelas dan sistem pendukung formal sangat penting dalam membangun kapasitas kolaboratif antarsektor. Di kabupaten Sumedang, implementasi regulasi bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional dalam membangun struktur koordinasi dan akuntabilitas. Kapabilitas institusi pun meningkat melalui pelatihan teknis, pembentukan tim lintas sektor, dan pelibatan masyarakat desa. Ini sejalan dengan

teori Agranoff dan McGuire (2017:135) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kapasitas organisasi, baik dalam aspek teknis maupun sumber daya manusia. Tanpa kapabilitas yang memadai, kolaborasi hanya akan bersifat seremonial. Faktor Politik

7. Faktor politik juga menunjukkan arah yang positif. Tidak terdapat konflik politik yang berarti dalam pelaksanaan kolaborasi, karena pendekatan teknokratis, netralitas birokrasi, serta kebijakan berbasis data telah meredam potensi gesekan politik. Ini diperkuat oleh dokumentasi resmi seperti surat edaran netralitas ASN dan laporan evaluasi kebijakan. Keberadaan komitmen terhadap netralitas menjadikan arena kolaborasi sebagai ruang publik yang profesional dan bebas dari kepentingan partisan, partisipasi aktif pemimpin politik sebagai fasilitator program menjadi indikator penting keberhasilan. Kepemimpinan inklusif ini sejalan dengan konsep *facilitative leadership* yang diungkap oleh Ansell dan Gash (2007:550), bahwa pemimpin dalam sistem kolaboratif seharusnya mendorong partisipasi seajar dan menjembatani kepentingan semua pihak, bukan mendominasi proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang memerlukan rekonstruksi terhadap model teori *Ansell dan Gash* (2007). Rekonstruksi ini dilakukan dengan menambahkan dua dimensi baru, yaitu kapabilitas institusi dan stabilitas politik lokal, karena kedua aspek ini terbukti sangat berpengaruh terhadap efektivitas kolaborasi, namun tidak tercakup dalam kerangka teori asli. Kapabilitas institusi berkaitan dengan kesenjangan kapasitas teknis dan pemahaman indikator antarwilayah serta antaraktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Sementara itu, stabilitas politik lokal berperan sebagai penguat kolaborasi, karena dukungan aktif dan konsisten dari Bupati, DPRD, serta aktor politik lainnya menciptakan legitimasi dan keberlanjutan program tanpa intervensi negatif. Kedua aspek ini tidak diakomodasi dalam model asli *Ansell dan Gash* yang lebih berorientasi pada struktur dan proses deliberatif formal.

4. CONCLUSION

Penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang menunjukkan hasil yang cukup signifikan, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari tahun ke tahun. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan aktor non-pemerintah telah terwujud melalui berbagai program, termasuk “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Binaan” dan pengaktifan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Namun, efektivitas kolaborasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal rendahnya tingkat kepercayaan antar aktor, belum optimalnya regulasi dan SOP pendukung, serta keterbatasan partisipasi dari sektor non-pemerintah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi seperti pembangunan kepercayaan yang berkelanjutan, penetapan regulasi dan SOP yang jelas, pelatihan lintas sektor, serta kepemimpinan politik yang inklusif dan konsisten. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan *collaborative governance* telah membawa kemajuan, keberlanjutannya membutuhkan penguatan tata kelola, pelembagaan kolaborasi yang lebih sistematis, serta perluasan partisipasi.

REFERENCES

- Abdul Rahim, Z. (2022). *Collaborative Governance Model Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Sungai/Parit Sebagai Batas Daerah Kota Pontianak Dengan Kabupaten Kubu Raya* (Z. and A. Rahim (ed.)). Scopindo media pustaka.
- Akadun. (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Alfabeta.
- Akadun. (2023). Kontruksi Organisasi Melalui Perspektif Collaborative Governance. [http://jiapi.Ut.Ac.Id/Index.Php/Jiapi/Index](http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index), 4(1), 48–54.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Karakteristik Kemiskinan Kabupaten Sumedang, 2021-2023*. <https://sumedangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTYjMg==/karakteristik-kemiskinan-kabupaten-sumedang.html>
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori dan Program*. Gava Media.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. RMBooks.
- Handayani, N., Risianti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>

- Koisin, E., & Melayaman, M. (2024). *Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Model Collaborative Governance pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar*. 14, 271–283.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2014). *Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. Mandar Maju.
- Silalahi, U. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algesindo Offset.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Edisi Revi). Alfabeta.
- Sunu. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*. FISIP Universitas Diponegoro.